

BAB I

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan PKn

Pendidikan moral di Indonesia, secara tradisional, berisi nilai-nilai kemasyarakatan, negara dan agama. Pada mulanya, pendidikan moral dilaksanakan melalui pendidikan agama dan budi pekerti, tidak ada pendidikan moral secara eksplisit. Akan tetapi kemudian berkembang dari waktu ke waktu sehingga tidak lagi menyatu dengan pendidikan agama dan budi pekerti.

Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran Kewarganegaraan memuat isi pokok cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Dari sudut pengetahuan tentang negara diperkenalkan juga mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga mata pelajaran tersebut semata-mata memuat aspek kognitif.

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di Negara Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku, dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kejadian ini membuat perubahan arah di bidang pendidikan. Perubahan arah ini ditandai dengan diperkenalkannya mata pelajaran Civics di SMP dan SMA, yang isinya meliputi Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, Pidato-pidato Kenegaraan Presiden, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah "Civics Manusia Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" yang lebih dikenal dengan singkatan "TUBAPI". Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinasi. Buku pegangan siswa untuk mata pelajaran ini belum ada.

Pada tahun 1962, istilah Civics diganti dengan istilah Kewargaan Negara atas anjuran Dr. Sahardjo, S.H.yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu 'membentuk warga negara yang baik'.

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI yang kemudian diikuti oleh pembaharuan tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diteruskannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baru, yang mengandung tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen.

Perubahan sistem ketatanegaraan/pemerintahan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri P & K No. 31/1967 yang menetapkan bahwa pelajaran Civics isinya terdiri atas:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Ketetapan-ketetapan MPRS
4. Pengetahuan tentang PBB

Pada tahun 1968, kebijaksanaan dalam bidang pendidikan ini disusul dengan keluarnya Kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini istilah Civics, yang secara tidak resmi diganti dengan istilah Kewargaan Negara, diganti lagi dengan Pendidikan Kewargaan Negara, yang lebih dikenal dengan singkatan PKN. Pendidikan Kewargaan Negara padamas ini sudah tidak lagi menggunakan metode indoktrinasi dalam pengajarannya. Bahan pokoknya pun telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut yang meliputi:

1. Untuk tingkat Sekolah Dasar:
 - a. Pengetahuan Kewargaan Negara
 - b. Sejarah Indonesia
 - c. Ilmu Bumi
2. Untuk tingkat SMP
 - a. Sejarah Kebangsaan
 - b. Kejadian setelah kemerdekaan

- c. UUD 1945
 - d. Pancasila
 - e. Ketetapan-ketetapan MPRS
3. Untuk tingkat SMA
- Uraian pasal-pasal dalam UUD 1945 dihubungkan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi

Pada tahun 1973, oleh Badan Pengembangan Pendidikan (BP3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan Kewargaan Negara, telah ditetapkan 8 tujuan kurikuler, yang meliputi bidang:

1. Hak dan kewajiban warga Negara
2. Hubungan luar negeri/pengetahuan internasional
3. Persatuan dan kesatuan bangsa
4. Pemerintahan demokrasi Indonesia
5. Keadilan negara bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Pembangunan negara ekonomi
7. Pendidikan kependudukan
8. Keamanan dan ketertiban masyarakat

Walaupun bahan pokok dan tujuan kurikuler telah ditetapkan, namun pada waktu itu belum disusun buku pegangan resmi, baik bagi murid maupun bagi guru. Dengan tidak adanya pegangan resmi dari pemerintah, maka setiap sekolah/guru mengambil kebijaksanaan sendiri-sendiri tentang buku ini. Maka dapat dimengerti kalau pada waktu itu beredar berbagai karangan tentang Pendidikan Kewargaan Negara untuk segala jenjang atau tingkat pendidikan, demi memenuhi kebutuhan di lapangan. Perlu adanya catatan yang penting dari PKN tersebut yaitu aspek afektif tidak muncul. Pendidikan Kewargaan Negara ternyata hanya menitikberatkan pada aspek kognitif saja. Selain itu, pembentukan moral Pancasila kepada peserta didik tidak secara eksplisit, sehingga PKN ini tidak akan berhasil

membawa amanat/pesan dari pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Keadaan semacam ini ditambah dengan buku pegangan untuk murid yang beraneka ragam, buku pegangan guru yang beraneka ragam, pengembangan materi oleh guru yang sangat diwarnai oleh ilmu yang dimilikinya serta pola berpikirkannya, akan menyebabkan keanekaragaman output, baik aspek kognitif maupun aspek afektif.

Era baru dalam bidang ketatanegaraan muncul. MPR hasil pemilu menghasilkan GBHN dalam Keputusan No VI /MPR 1973 yang menginstruksikan adanya PMP di semua jenjang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Pada akhir tahun 1975, tim Nasional Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Kurikulum dan Garis-garis Besar Pengajaran dalam bidang studi PMP untuk SD, SMP, dan SMA

Tahun 1978 MPR hasil pemilu yang kedua sesudah Orde Baru, berhasil mengeluarkan Keputusan No II/MPR/1978 yang memuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa. Keputusan ini bermaksud memberikan penjabaran yang sederhana, jelas dan mudah dipahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (selanjutnya dikenal dengan 36 butir nilai P4), untuk dapat dipakai sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh setiap warga negara Indonesia.

Keluarnya Tap MPR tersebut sangat bermakna bagi PMP, karena akan lebih memperjelas arah ke mana PMP akan bermuara. Dalam kurikulum 1975 telah ditetapkan sejumlah pokok bahasan sebagai materi PMP ditambah atau diperkaya dengan materi Tap MPR No II/MPR/1978. Namun belum terdapat buku paket untuk murid. Untuk menghindari adanya pengembangan materi yang beaneka ragam oleh guru/peminat penulis buku, maka mulai tahun 1978 telah dirintis penulisan buku paket PMP untuk SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini diakhiri dengan diterbitkannya buku paket PMP tersebut pada tahun 1980 dan seterusnya dipergunakan di sekolah-

sekolah dari SD sampai SMA. Pada tahun 1982, buku paket PMP dikoreksi dengan mendapatkan banyak sumbangan pemikiran dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, pendidik serta para cerdik cendekiawan. Akhirnya setelah dikoreksi kemudian dicetak ulang dan disahkan penggunaannya dengan Keputusan Menteri P & K No 137/C/Kep/R/83, dan sekaligus menarik buku-buku PMP cetakan lama.

Selanjutnya, lembaga tertinggi negara hasil pemilu ketiga setelah Orde Baru, berhasil mengeluarkan produknya antara lain Tap MPR No II/MPR/1983 tentang GBHN. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari GBHN ini, yaitu:

1. Pendidikan Moral Pancasila masih tetap diberikan di sekolah-sekolah.
2. Munculnya unsur baru dalam Pendidikan Pancasila, yaitu:
 - a. Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - b. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Kurikulum 1975 nampaknya sudah seharusnya ditinjau kembali. Hasil penilaian menunjukkan bahwa ada kelemahan-kelemahan yang berkenaan dengan aspek keselarasan antara lingkup dengan kedalaman bahan yang menyebabkan saratnya materi pelajaran, keselarasan vertikal yang menyangkut tata urutan pokok bahasan, dan kesesuaian materi dengan perkembangan baru. Sehubungan dengan hal itu, maka muncullah Keputusan Menteri P & K dengan No 0461/U/1984 tentang perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Keputusan Menteri P & K No 0209/U/1984, tentang Perbaikan Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas. Salah satu ciri khas kurikulum ini, selanjutnya disebut dengan Kurikulum 1984, adalah diterapkannya keluwesan program. Khususnya untuk bidang studi PMP perlu pembenahan dalam hal ranahnya. Pada kurikulum 1975, walaupun disadari bahwa PMP adalah pendidikan moral, namun titik beratnya masih ranah pengetahuan. Oleh karena itu, ada penataan kembali ke dalam kurikulum 1984, yang lebih menitikberatkan pada ranah moral (afektif), disamping secara integrative

perlu diperhatikan ranah lainnya yaitu pengetahuan (kognitif) dan perbuatan (psikomotor).

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU No.2 tahun 1989, pada tanggal 25 Februari 1993 telah terbit keputusan Mendikbud No.060/U/1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Kurikulum tersebut secara bertahap dinyatakan mulai berlaku pada tahun ajaran 1994/1995. Oleh karena itu kemudian kurikulum tersebut dikenal dengan *Kurikulum Dikdas 1994* atau *Kurikulum '94*.

Pada tahun 1994, nama Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bila dikaitkan dengan kurikulum sebelumnya, mata pelajaran tersebut memadukan konsep Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Istilah Pendidikan Moral Pancasila diperbaiki menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian dipadukan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan". Pendidikan Pancasila memiliki konotasi *lebih luas* dan *utuh* daripada Pendidikan Moral Pancasila, karena Pancasila tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga mengandung konsep, nilai, moral, dan norma. Karena itu, perubahan ini sangat tepat. Materi yang terkandung dalam pelajaran PPKn tidak jauh berbeda dengan materi yang terkandung dalam pelajaran PMP. Selanjutnya pada tahun 1999 dimasukkan suplemen (tambahan) materi PPKn sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi. Materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam suplemen kurikulum 1999, karena Tap MPR tentang P-4 telah dicabut dengan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pada tahun 2000, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi maka bidang pendidikan pun mengalami perubahan. Adanya tuntutan bahwa pengetahuan yang didapatkan di sekolah harus bisa menopang kebutuhan *skill* yang terus bertambah maka lahirlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada tahun

ini berganti nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tahun 2004 kurikulum PKn SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS, menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial), sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kurikulum Berbasis Kompetensi kewarganegaraan tampak telah mengarah pada tiga komponen PKn yang bermutu seperti yang diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civics and Government*. Ketiga komponen tersebut yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan).

Pada tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum ini PKn di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKn. Demikian pula pada tingkat SMP dan SMA PKn menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

1. Tujuan PKn

Seperti halnya mata pelajaran yang lain, PKn juga memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi kepada siswa sebagai berikut:

- a. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
- b. berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

- c. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan melihat tujuan mata pelajaran PKn di atas dapat disimpulkan bahwa di dalamnya memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk dapat mencapai tujuan mata pelajaran PKn tersebut secara maksimal, maka guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang digunakan di kelas yang sesuai dengan masing-masing aspek pembelajaran.

2. Ruang Lingkup PKn

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang cukup banyak. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menguraikan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

- c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

C. Paradigma Baru PKn

Paradigma berarti suatu model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antarbangsa yang semakin ketat, maka bangsa Indonesia

mulai memasuki era reformasi di berbagai bidang menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.

Dalam masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (*civil society*), pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Proses pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) yang sejak proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi Negara RI. Pada hakekatnya, proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah, pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan tentunya memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru.

Tugas PKn paradigma baru adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional.

Dalam KBK kewarganegaraan telah mengarah pada pengembangan tiga komponen PKn paradigma baru seperti yang diajukan diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civics and Government*. Ketiga komponen PKn paradigma baru tersebut adalah *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) (Branson, 1999: 8-25).

Dalam dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Materi yang termasuk ke dalam pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan bebas yang tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggungjawab warganegara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik (Depdiknas, 2002: 10).

Sementara itu dalam dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

Pada dimensi yang ketiga yaitu dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Dimensi ini mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas, 2002: 11).

Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKn. Model pembelajaran dapat digunakan salah satunya adalah pembelajaran berbasis portofolio yang lebih dikenal dengan "Proyek-belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia (PKKBI)" yang dianggap sebagai model pembelajaran yang paling tepat dan sesuai dengan paradigma baru PKn.

Keunggulan dari paradigma baru PKn dengan model pembelajaran adalah memfokuskan pada kegiatan belajar siswa aktif (*active students learning*) dan

pendekatan inkuiri (*inquiry approach*). Model pembelajaran PKn dengan paradigma baru memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis
2. Membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah
3. Melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah
4. Melatih siswa untuk berpikir dengan ketrampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inkuiri.

D. Kewarganegaraan Multidimensi

Zaman semakin berkembang ke arah yang lebih modern dan kompleks. Seperti yang terjadi di era abad 21 yang dikenal dengan era globalisasi muncul banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Tantangan yang muncul di era global sering dikenal dengan istilah trend global antara lain masalah ekonomi gobal, teknologi dan informasi, rekayasa genetika, dan kependudukan dan lingkungan hidup. Dari trend global yang muncul tersebut, akan menimbulkan masalah di bumi ini antara lain perusakan lahan subur, menipisnya akuifer utama, hujan asam, pembuangan limbah nuklir dan kimia, penipisan sumber daya, spesies terancam punah, erosi, perusakan hutan hujan, salinasi karena praktek-praktek irigasi yang buruk, keracunan dari atmosfer, penipisan ozon dan perubahan iklim, persediaan kritis kekurangan air segar yang diprediksi akan menjadi hal yang paling pendting pada kurun waktu 50 tahun mendatang (John J. Cogan dan Ray Derricot, 2009).

Untuk menghadapi tantangan yang muncul di era globalisasi diperlukan kesiapan diri setiap bangsa. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, termasuk di Indonesia perlu untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di era global yang mengalami perubahan dengan begitu cepat. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam konteks nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan yang dapat terjadi secara nasional, maupun internasional, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting

untuk memperkuat rasa identitas nasional setiap bangsa agar tidak dengan mudah terbawa arus perubahan yang terjadi.

Pada perkembangan di era globalisasi ini muncul istilah kewarganegaraan multidimensi. Diprediksi bahwa model pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada tidak akan cukup digunakan untuk menghadapi tantangan yang muncul di era global. Oleh karena itu kebijakan pendidikan kewarganegaraan di masa mendatang harus didasarkan pada konsepsi kewarganegaraan multidimensi. Kewarganegaraan multidimensi diprediksi akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang muncul pada abad ke-21. Kewarganegaraan multidimensi yang dimaksudkan di sini harus dikembangkan pada semua aspek pendidikan yaitu kurikulum dan pedagogi, pemerintahan dan organisasi, dan hubungan sekolah-masyarakat (John J. Cogan dan Ray Derricot, 2009).

Istilah kewarganegaraan multidimensi dapat dilihat melalui empat dimensi, yaitu dimensi personal, sosial, spasial dan temporal. Dimensi personal dimaksudkan bahwa kewarganegaraan multidimensi meliputi kapasitas personal dan komitmen terhadap etika warganegara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan tanggung jawab pikiran, perasaan, dan tindakan baik secara individual dan sosial. Dalam dimensi sosial kewarganegaraan mengakui bahwa walaupun kualitas pribadi itu sangat penting, tetapi itu tidak cukup untuk membangun kewarganegaraan multidimensi. Kewarganegaraan perlu menekankan pada aktivitas sosial, yang melibatkan orang lain untuk hidup dan bekerja sama untuk tujuan-tujuan kewarganegaraan. Dimensi spasial mengharuskan mengharuskan warganegara untuk mampu hidup dan bekerja pada tingkat lokal, regional, nasional dan multinasional. Penggabungan antara dimensi spasial, sosial dan pribadi akan membuat warganegara berfikir secara global sambil bertindak secara lokal (*act locally, think globally*). Adapun dimensi temporal menekankan bahwa warga negara dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi sekarang ini

tidaklah hanya terkait dengan masa sekarang sehingga mereka lupa akan masa lalu dan masa yang akan datang. Dalam dimensi temporal kewarganegaraan multidimensi menekankan pada keadaan sekarang dan tantangan-tantangannya agar ditempatkan dalam konteks baik dimasa lalu maupun masa yang akan datang (John J. Cogan dan Ray Derricot, 2009).

Dalam bukunya *Citizenship for 21st Century An International Education Perspective*), John J. Cogan dan Ray Derricot (2009) menuliskan bahwa untuk menghadapi abad 21 diperlukan delapan karakteristik kewarganegaraan abad 21, yaitu:

1. Kemampuan melihat dan mendekati masalah sebagai masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain melalui cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya pada masyarakat.
3. Kemampuan memahami dan menerima menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis.
5. Kemampuan menyelesaikan konflik secara damai atau tanpa kekerasan.
6. Keinginan mengubah gaya hidup yang konsumtif menjadi memelihara lingkungan.
7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi HAM
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat nasional dan internasional

Untuk dapat mewujudkan karakteristik warga negara seperti yang telah dituliskan di atas, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaknya tidak lagi dibelajarkan secara konvensional yaitu dengan indoktrinasi dan ceramah semata, tetapi perlu diadakan perubahan-perubahan yang penting dalam berbagai hal. Perubahan perlu dilakukan dalam bidang penyusunan kurikulum, pembelajaran di kelas, menjadikan sekolah sebagai model dalam kehidupan bermasyarakat, dan perlunya jalinan kerjasama dengan masyarakat.

Perubahan-perubahan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menuntut kemampuan guru yang profesional. Menurut John J. Cogan dan Ray Derricot (2009) menjelaskan kriteria guru yang profesional untuk menghadapi era global adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum dan pengajaran disusun berdasarkan musyawarah.
2. Kurikulum dan pengajaran berbasis informasi dan media
3. Menggunakan teknologi untuk mengajar, belajar, dan meneliti.
4. Fokus pada isu-isu lingkungan dan masalah-masalah alam global mungkin menampakkan diri secara lokal.
5. Kurikulum berorientasi global, yaitu menggunakan contoh, bacaan, ilustrasi bersifat pendidikan, bahan pelajaran, media yang ada di bagian dunia lain.
6. Proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai demokratis.
7. Pengembangan hubungan kerjasama dan kolaboratif.
8. Praktek dalam penerapan pembelajaran dalam masyarakat luas.

Guru yang profesional dapat dibentuk dengan memahami kewarganegaraan multidimensi secara baik, dan mampu melakukan jalinan kerjasama dengan masyarakat luas. Dalam konteks pembentukan kewarganegaraan multidimensi, guru harus bisa dijadikan model bagi peserta didiknya, sehingga perilaku guru yang mencerminkan sikap warga global agar dapat mudah ditiru oleh siswa. Hal ini penting dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar mengingat usia sekolah dasar adalah usia dimana siswa dengan mudah akan meniru contoh-contoh yang mereka lihat, termasuk contoh dari guru-guru di sekolah. Oleh karena itu peran teladan dari guru yang mencerminkan perilaku sebagai warga negara global sangat penting.

BAB II

KURIKULUM PKn di SD

A. Konsep Dasar Kurikulum

Ditinjau dari asal katanya (*etimologi*) istilah kurikulum berasal dari bahasa latin *curere* yang artinya *berlari*. Seterusnya lahir istilah *curicle* yang berarti *kereta dua yang di tarik oleh dua ekor kuda*. Selanjutnya lahir istilah *curriculum* yang berarti mata pelajaran yang harus dilatihkan (*course of study or training*). Menurut perumusan tradisional kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran-mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah kepada siswa untuk memperoleh ijazah, kenaikan kelas atau tingkat. Pandangan secara tradisional ini sangat sangat sempit dan terbatas sekali. Perkembangan selanjutnya yang lebih modern kurikulum diartikan segala sesuatu kegiatan (baik intra, ko dan ekstra kurikuler) yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga pendidikan dan diberikan kepada siswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Apabila kita perhatikan perkembangan dunia pendidikan dewasa ini

rupa-rupanya cakupan kegiatan sekolah tidak hanya menyampaikan sederet mata pelajaran. Namun lebih luas dari itu. Dengan demikian perumusan kurikulum yang tradisional kurang relevan lagi.

Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwodarminto) pengertian kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran. Berpijak dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa kurikulum adalah suatu perangkat atau rangkaian kegiatan dalam lembaga pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah dipatokkan atau ditetapkan. Dalam UUSPN N0.20 tahun 2003 (pasal 1 ayat 19) dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dewasa ini pengertian kurikulum menurut beberapa pakar tidak hanya diartikan sebagai daftar mata pelajaran atau tujuan yang akan di capai, tetapi pengertian kurikulum minimal mengandung empat dimensi yang saling berhubungan, yakni:

1. Kurikulum sebagai ide, berarti bahwa kurikulum sebagai buah pikiran para ahli /seseorang pengembang kurikulum, misalnya : apa yang ingin dikembangkan pada diri siswa, bagaimana cara mengembangkannya, pengalaman belajar apa yang paling baik dan bagaimana cara penyampaiannya pada siwa dan sebagainya.
2. Kurikulum sebagai rencana tertulis, ini adalah dimensi paling kongkrit tentang pengertian kurikulum dibandingkan dengan dimensi lain. Dalam dimensi ini kurikulum dimaksudkan sebagai pegangan guru, isinya merupakan materi/bahan minimal secara nasional, sehingga guru masih ada kesempatan untuk mengembangkan

3. Kurikulum sebagai kegiatan, ini merupakan hasil terjemahan guru (operasional) tentang kurikulum di lapangan yang didasarkan pada kurikulum sebagai ide atau sebagai rencana yang tertulis. Faktor kemampuan (pengalaman), kemauan dan sarana sekolah cukup menentukan agar hasil yang dicapai sesuai dengan ide dan rencana sebelumnya.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diperoleh oleh anak didik. Hasil tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya baik yang bersifat sementara atau menetap.

B. Konsep Kurikulum PKN di SD-MI

Pendidikan terjadi ketika ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dalam lingkungan keluarga interaksi antara ayah dan anak merupakan proses dalam pendidikan. Interaksi ini berjalan tanpa adanya perencanaan secara tertulis. Orang tua kadangkala tidak mempunyai perencanaan yang jelas dan terinci dalam melakukan proses pendidikan. Mulai dari pertanyaan bagaimana mendidik, bagaimana prosesnya, dan mau dijadikan apa anaknya kelak. Itulah potret yang terjadi dalam pendidikan keluarga. Interaksi pendidikan antara orang tua dengan anaknya sering tidak disadari. Dalam kehidupan keluarga interaksi pendidikan dapat terjadi setiap saat, setiap kali orang tua bertemu, berdialog dan bergaul dengan anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik karena statusnya sebagai ayah dan ibu. Pendidikan yang dilakukan bersifat informal. Sehingga pendidikan dalam keluarga lebih di kenal dengan pendidikan informal, karena tidak menerapkan kurikulum formal maupun tertulis.

Berbeda dengan pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Proses dalam pendidikan sekolah melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis. Guru sebagai pendidik merancang sedemikian rupa kompetensi yang dihasilkan oleh siswa. Setiap praktik pendidikan diarahkan kepada pencapaian

tujuan tertentu, apakah berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja. Untuk menyampaikan bahan pelajaran, ataupun pengembangan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian serta alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga di perlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Keempat hal yang mempengaruhi adalah tujuan, bahan ajar, metode-alat, dan penilaian merupakan komponen-komponen utama dalam kurikulum. Dengan berpedoman pada kurikulum, interaksi pendidikan antara guru dan siswa berlangsung. Interaksi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu dalam lingkungan tertentu, yang mencakup lingkungan fisik, alam, sosial buidaya, ekonomi, politik, dan religi.

Kurikulum menurut pandangan lama mempunyai makna kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau di pelajari oleh siswa. Pengertian ini sudah ada sejak zaman Yunani dan masih ada sebagian yang berpandangan seperti ini sampai sekarang. Bahkan sebagian orang tua atau guru ketika di tanya tentang kurikulum, akan memberikan jawaban seputar bidang studi atau mata pelajaran. Lebih khusus kurikulum diartikan sebagai isi pelajaran.

Pendapat yang muncul selanjutnya adalah kurikulum tidak hanya berdasarkan isi, tapi lebih menekankan kepada pengalaman belajar. Menurut Ronald C.Doll (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 4), kurikulum tidak hanya berupa penekanan dari isi kepada proses, tetapi menunjukkan adanya perubahan lingkup, dari konsep yang sangat sempit kepada konsep yang lebih luas. Sehingga pengalaman siswa merupakan konsep yang lebih luas. Pengalaman dapat berlangsung di sekolah, rumah ataupun di masyarakat, baik bersama guru ataupun tanpa guru.

Kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana (*curriculum plan*) dengan kurikulum yang fungsional (*fungsional curriculum*).

Menurut Beauchamp (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 5) kurikulum adalah suatu rencana pendidikan suatu pengajaran. Suatu kurikulum merupakan perwujudan atau penerapan teori-teori kurikulum. Teori-teori tersebut merupakan hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan para ahli kurikulum.

Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 27) membagi tiga konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi yaitu di pandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kurikulum sebagai bidang studi yaitu bidang studi kurikulum

C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn SD

Dalam KTSP memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan tujuan yang akan dicapai guru melalui proses belajar mengajar. Setiap guru harus mengembangkan secara otonomi dalam membelajarkan kepada siswa. Berikut ini diuraikan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn di sekolah dasar yang termuat dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan:

Kelas I, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun di

	rumah dan di sekolah
2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah

Kelas I, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah	4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

Kelas II, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Membiasakan hidup bergotong royong	1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong 1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah

2. Menampilkan sikap cinta lingkungan	2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan 2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
---------------------------------------	---

Kelas II, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap demokratis	3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah 3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) 3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan
4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila	4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari

Kelas III, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda	1.1 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa

	1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat	<p>2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p> <p>2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p> <p>2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p>

Kelas III, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memiliki harga diri sebagai individu	<p>3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri</p> <p>3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain lain</p> <p>3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri</p>

4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia	<p>4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan</p> <p>4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia</p>
---	--

Kelas IV, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan	<p>1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan</p> <p>1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan</p>
2. Memahami sistem Pemerintahan kabupaten, kota, dan Provinsi	<p>2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi</p> <p>2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi</p>

Kelas IV, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Mengetahui sistem pemerintahan tingkat pusat	3.1 Mengetahui lembaga-lembaga negara dalam susunan

	<p>pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll.</p> <p>3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri</p>
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya	<p>4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya</p> <p>4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional</p> <p>4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya</p>

Kelas V, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	<p>1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>

	1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 2.2 Memberikan contoh peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok

Kelas V, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami kebebasan berorganisasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
4. Menghargai keputusan bersama	4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 4.2 Mematuhi keputusan bersama

Kelas VI, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah

Kelas VI, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
---------------------------	-------------------------

<p>3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negaranegara di Asia Tenggara</p>	<p>3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara</p> <p>3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara</p>
<p>4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi</p>	<p>4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif</p> <p>4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional</p>

D. Pengembangan Kurikulum PKn SD

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang SD dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Dalam lampiran permendiknas No. 22 Tahun 2006, pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi,

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Prinsip Penyajian Kurikulum

Prinsip penyajian dalam PKn menurut Abdul Aziz Wahab (2002: 28) ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Dari mudah ke sukar

Prinsip ini digunakan dalam pengajaran khususnya dalam pendidikan nilai, moral, dan teori-teori pendidikan. Untuk memahami hal-hal yang bersifat sukar dimulai dari yang bersifat mudah. Untuk aspek kognitif ukuran mudah hingga sukar dapat dilihat dari enam tingkatan yang dikemukakan oleh Bloom.

2. Dari sederhana ke rumit

Prinsip penyajian kurikulum dari sederhana ke rumit ini pada dasarnya cocok untuk mengajarkan konsep atau nilai dan moral yang berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan, latihan atau keteladanan yang di mulai sejak kecil, akan terbiasa dengan hal-hal yang baik yang sifatnya masih sederhana, kemudian ditingkatkan secara bertahap ke hal-hal yang sifatnya lebih sukar. Kematangan usia juga sangat memiliki peran dalam kaitannya dengan fase-fase perkembangan. Siswa sekolah dasar mudah menangkap dari hasil pengamatan.

3. Dari yang bersifat kongkrit ke abstrak

Siswa sekolah dasar pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya kongkrit dari pada yang sifatnya abstrak, karena mengingat perkembangan kognitif siswa sekolah dasar sedang berada pada tahap operasional kongkrit. Guru dapat memulainya dengan memberikan contoh-contoh sederhana yang dapat ditiru oleh siswa.

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang banyak memuat konsep nilai dan moral. Keduanya merupakan konsep yang sangat abstrak. Mau tidak mau agar konsep nilai dan moral dapat terinternalisasi dalam diri siswa dengan baik, maka guru harus berusaha untuk mengkongkritkan konsep-konsep yang abstrak tersebut agar mudah dipahami siswa. Dalam pembelajaran guru memerlukan media guna mempermudah pemahaman siswa.

Sebagai contoh untuk mengajarkan konsep **kedisiplinan**. Jika hanya diajarkan melalui ceramah tanpa didukung oleh media yang tepat, siswa akan mengalami kebingungan untuk memahami konsep kedisiplinan tersebut. Contoh media yang dapat digunakan guru misalnya gambar

tentang perilaku disiplin. Melalui pengamatan terhadap gambar tersebut siswa akan lebih mudah memahami makna konsep kedisiplinan.

4. Dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas

Kurikulum hendaknya disajikan dengan mengikuti alur spiral yang lingkungannya semakin lama semakin meluas. Jika dilihat dari luas sempitnya lingkungan pendidikan, keluarga adalah tempat yang lingkungannya paling sempit dalam pendidikan anak. Akan tetapi keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Sejak pertama kali dilahirkan anggota keluarga merupakan orang pertama yang ditemui anak dan menjadi orang pertama pula tempat anak belajar. Dalam keluarga anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan interaksi dengan anggota keluarga yang lain.

Melihat uraian di atas, maka guru dalam menyajikan kurikulum di sekolah hendaknya memulai dari tingkat keluarga. Contoh-contoh diberikan dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam keluarga. Misalnya akan mengajarkan tentang konsep "Presiden" sebagai kepala negara. Dimulai dulu dari konsep kepala keluarga, kepala desa, kepala daerah, baru kemudian kepala negara. Demikian pula untuk mengajarkan konsep interaksi sosial, guru dapat memulai dari interaksi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, negara, hingga meluas pada interaksi sosial dalam tataran internasional.

BAB III

PEMBELAJARAN PKn di SD

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran

Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui proses belajar mengajar ini diharapkan siswa dapat menguasai kompetensi dasar secara tuntas. Ketercapaian kompetensi dasar yang hendak dikuasai siswa dipengaruhi oleh beberapa elemen pembelajaran diantaranya, siswa, guru, sarana dan prasarana, sumber belajar, dan lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik belajar siswa dalam kelas sangat majemuk. Kemajemukan karakteristik cara belajar siswa di dalam kelas menuntut guru untuk dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi agar dapat mengadopsi kemajemukan cara belajar siswa ini. Misalnya ada siswa yang senang belajar dengan mendengar, sementara ada siswa yang sulit menerima materi pelajaran jika hanya dengan mendengar tetapi harus disertai dengan gambar. Selain karakteristik belajar siswa yang majemuk, karakteristik materi pembelajaran pun sangat beragam. Ada materi yang cocok disampaikan dengan metode ceramah, akan tetapi ada pula materi yang menuntut guru menyampaikannya dengan metode demonstrasi, simulasi, dan lain sebagainya.

Pembelajaran di kelas hendaknya ditekankan pada *students active learning*, sehingga peran guru lebih sebagai fasilitator. Untuk mengaplikasikan konsep *students active learning*, proses belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas dipengaruhi iklim kelas pula oleh iklim kelas yang diciptakan. Menurut Mathews (2003: 7) menjelaskan bahwa kelas yang dapat mengundang siswa-siswanya agar dapat belajar secara aktif harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Guru bersama-sama dengan siswa bertanggung jawab untuk menciptakan iklim kelas yang baik.

Iklm kelas yang baik akan dapat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Oleh karena itu sebaiknya kelas *disetting* untuk dapat menjadi sebuah kelas yang kondusif untuk belajar. Penciptaan iklim kelas yang kondusif ini menjadi tanggung jawab warga kelas, yaitu guru dan siswa secara bersama-sama.

Untuk menciptakan iklim kelas yang baik dapat dilakukan dengan melibatkan siswa untuk membuat aturan kelas. Keterlibatan siswa dalam membuat aturan kelas akan mempengaruhi pada ketaatan siswa terhadap aturan yang disepakatinya. Siswa akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap aturan yang ada. Siswa akan menyadari bahwa aturan yang ada merupakan hasil kesepakatan sosial antar warga kelas, sehingga akan lebih mudah untuk mengikuti. Berbeda jika aturan kelas mutlak berasal dari guru. Akan tercipta kesan seolah-olah guru menjadi sangat diktator dalam menerapkan aturan kelas.

2. Guru harus menjadi model dan pendorong bagi siswanya untuk berpikir kritis.

Kebiasaan berpikir kritis bukan hanya menjadi tuntutan bagi siswa, tetapi juga guru. Di sekolah dasar guru adalah model belajar yang akan banyak ditiru siswa. Tidak terkecuali dalam hal cara berpikir. Jika guru mencontohkan cara berpikir kritis, maka secara bertahap pun siswa akan mengikutinya. Tetapi jika guru tidak menjadikan dirinya sebagai model dalam berpikir kritis bagi siswanya, maka pembelajaran yang berlangsung pun tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis. Guru tidak cukup hanya memberikan nasehat kepada siswa agar mereka terbiasa berpikir kritis, tetapi guru harus mendemonstrasikan kepada siswa tentang bagaimana berpikir kritis dalam setiap pembelajaran yang berlangsung di kelas.

3. Diciptakan atmosfer kelas yang mendorong siswa untuk melakukan *inquiry* dan terbiasa berpikir terbuka.

Untuk menciptakan kelas yang mampu mendorong siswa untuk melakukan penemuan dalam belajar dan memiliki wawasan pemikiran yang lebih terbuka guru dan siswa dibiasakan untuk menggunakan kata-kata tanya tingkat tinggi. Kata-kata tanya yang termasuk dalam *high level* bukan terbatas pada: "apa?", "dimana?", dan "kapan?", tetapi sampai pada "mengapa?", "apa jika?", dan "mengapa tidak?". pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendorong siswa untuk berpikir menganalisa suatu problem dan menentukan keputusan yang harus diambil. Dalam pola berpikir ini siswa akan terlibat dalam aktivitas membuat prediksi, mencari informasi, mengorganisasikan informasi, dan bertanya tentang kesimpulan yang akan diambil.

4. Siswa diberikan dorongan untuk berpikir secara benar.

Guru harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mampu berpikir secara benar, yaitu tentang bagaimana mereka berpikir, menemukan, dan komunikasi mereka dalam pembelajaran. Termasuk bagi siswa yang mampu berlatih untuk belajar sendiri dan mampu meningkatkan *performance* dalam belajar. Sebaliknya bagi siswa yang belum mencapai tingkatan tersebut di atas, guru harus memberikan beberapa bimbingan kepada siswanya untuk mencapai kemampuan belajar dengan tingkat ketergantungan yang kecil.

5. Penataan ruang kelas yang memudahkan siswa untuk dapat bekerjasama antara satu dengan lainnya.

Penataan ruang kelas memiliki peran penting yang akan mempengaruhi pola berpikir siswa di dalam kelas. Sedapat mungkin guru menyusun tempat duduk di ruang kelas yang memungkinkan siswa untuk

dapat melakukan kerjasama dengan siswa lainya di dalam kelas. Di samping itu tempat duduk juga disusun untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat berbicara satu dengan lainnya, sehingga akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran.

Untuk dapat menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar, guru perlu memiliki strategi yang baik dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran mengandung makna bahwa di dalamnya terdapat metode dan pendekatan yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Dalam Webster's Dictionary (1993) strategi diartikan "*the skillfull planning an managing of an activity*", sedangkan metode diartikan sebagai "*a manner, a process, or regular way of doing something*". Dalam Oxford American Dictionary (1986) memberikan definisi strategi "*the planning and directing of thew whole operation of a campaign or war*"; "*a plan or policy of this kind or to achive something*". Dalam makna ini strategi diartikan sebagai rencana untuk mencapai tujuan.

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1996:5) mendefinisikan strategi secara umum sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Sehingga apabila dihubungkan dengan belajar mengajar strategi bisa diartikan seagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Hamzah B. Uno (2006:45) menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni (1) strategi pengorganisasian pembelajaran, (2) strategi penyampaian pembelajaran dan (3) strategi pengelolaan pembelajaran.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1996:5-6) ada empat strategi dalam belajar mengajar, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.
2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.
3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.

Strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Menurut Gulo (2002: 11) strategi belajar mengajar berdasarkan komponen yang mendapat tekanan dalam proses pengajaran dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada guru
2. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik
3. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi pengajaran.

Sementara itu masih menurut Gulo (2002: 11), dilihat dari kegiatan pengolahan pesan atau materi, strategi belajar mengajar dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Strategi belajar mengajar ekspositori, di mana guru mengolah secara tuntas pesan/materi sebelum disampaikan di kelas sehingga peserta didik tinggal menerima saja.

2. Strategi belajar mengajar heuristik atau kurioristik, di mana peserta didik mengolah sendiri pesan/materi dengan pengarahan guru.

B. Metode Pembelajaran Dalam Pembelajaran PKn

Metode mengajar sering diartikan sebagai teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Penggunaan metode pengajaran haruslah tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan juga keadaan siswa dalam suatu kelas. Oleh karena itu dalam menentukan pilihan untuk memilih satu metode pengajaran tertentu guru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Siswa

Siswa merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan melalui proses belajar mengajar. Keadaan siswa di sekolah sangatlah bervariasi baik dari latar belakang ekonomi, sosial, biologis, kecerdasan, psikologis dan sebagainya. Kaitannya dengan teknik pemilihan metode pengajaran semua aspek tersebut harus diperhatikan oleh guru. Perbedaan yang dimiliki siswa bukan untuk dihilangkan, tetapi justru menjadi tantangan bagi guru untuk dapat memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang bermacam-macam.

2. Tujuan

Proses belajar mengajar di sekolah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran di sekolah salah satunya dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan metode pengajaran oleh guru. Dalam hal ini secara hirarkhi metode pengajaran harus tunduk terhadap tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Artinya bahwa metode pengajaran yang dipilih guru harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai.

3. Suasana

Guru dalam melakukan proses belajar mengajar dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda dari hari ke hari. Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa bosan dan monoton dengan kegiatan belajar mengajar yang diikutinya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru beserta siswa di sekolah tidak selalu harus berada di dalam kelas dengan pola pembelajaran yang dibatasi oleh sekat dinding kelas. Kegiatan belajar mengajar dapat pula dilakukan di luar kelas sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang ada di sekolah.

4. Guru

Dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar perlu disesuaikan dengan kemampuan penguasaan guru terhadap metode yang dipilih. Jangan sampai terjadi guru memilih metode pembelajaran, yang dia sendiri belum menguasai secara baik. Hal ini disebabkan ketidakmampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran akan berpengaruh juga pada keberhasilan guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran kepada siswa.

Dari beberapa metode pembelajaran yang ada, di bawah ini akan diuraikan metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar.

1. Modeling

Modeling dalam pembelajaran PKn dapat digunakan ketika guru mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. kemampuan anak usia sekolah dasar untuk meniru apa yang mereka lihat cukup kuat. Apalagi jika yang ditiru tersebut adalah perilaku dari orang yang dijadikan model bagi dirinya. Anak akan melihat dan mengamati apa yang dilakukan model kemudian menirukannya dalam berperilaku. Oleh karena itu khususnya dalam pembelajaran nilai moral yang menjadi model utama di sekolah adalah guru. Siswa akan memperhatikan setiap perilaku guru, dan selanjutnya akan meniru.

Bertolak dari hal ini, maka guru di sekolah hendaknya memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswanya.

Dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar selain contoh dari perilaku guru, model dalam pembelajaran PKn dapat berupa: (1) manusia, misalnya tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, pemimpin Negara, pahlawan bangsa. (2) non manusia, misalnya menggunakan kancil dalam cerita dongeng. Sebagai contoh, ketika guru mengajarkan tentang kompetensi dasar **melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar**, guru dapat mendatangkan aparat penegak hukum ke sekolah. Peran aparat penegak hukum di sini sebagai model. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru melibatkan aparat penegak hukum untuk menyampaikan materi tersebut. Perhatian anak-anak tentu akan lebih focus dan tertarik, karena anak-anak menganggap bahwa aparat penegak hukum adalah orang yang terlibat dalam penegakan pelaksanaan peraturan yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Gaming

Gaming merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. Dalam kegiatan *gaming* harus ada kompetisi. Dalam kompetisi siswa dituntut untuk berlomba-lomba untuk menentukan menang atau kalah. Penentuan menang atau kalah ini misalnya dilihat dari sisi perolehan skor, atau bisa juga adu kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal dengan benar. Metode pembelajaran *gaming* yang sering dipakai misalnya *team game tournament*, dan *broken square*. Materi yang bisa diajarkan melalui metode ini misalnya kompetensi dasar mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam metode *gaming* di sini guru dapat membuat puzzle keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengacaknya. Anak diminta untuk menyusun kembali *puzzle* tersebut menjadi gambaran utuh wilayah NKRI.

Kerumitan dan banyaknya potongan *puzzle* disesuaikan dengan tingkat kematangan berpikir anak.

3. *Value clarification technique (VCT)*

Value clarification technique (VCT) merupakan metode menanamkan nilai (*values*) dengan cara yang sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan/kemantapan nilai. Teknik yang digunakan dalam VCT bisa angket dan tanya jawab (Abdul Gafur, 2006:6). Lahirnya metode ini merupakan upaya untuk membina nilai-nilai yang diyakini, sehubungan dengan timbulnya kekaburan nilai atau konflik nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Soenarjati dan Cholisin, 1986 : 124).

Melalui pembelajaran dengan VCT dapat diajarkan kepada siswa tentang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai atas sesuatu
- b. Membuat penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Memiliki kemampuan serta kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menyangkut masalah nilai dengan jelas, rasional dan objektif
- d. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Model VCT yang dapat digunakan dalam pembelajaran analisa dilema nilai cukup bervariasi, di antaranya model VCT-metode percontohan (*example of the exploratory behaviour*), VCT tingkat urutan (*rank order*), model VCT klarifikasi nilai dengan kartu keyakinan (*evidence card*), VCT melalui teknik wawancara (*public interview*), teknik yurisprudensi (*jurisprudential technique*), VCT teknik inkuiri nilai dengan pertanyaan acak/random (*value inquiry random questioning technique (VIRQT)*).

Berikut ini akan dijelaskan beberapa metode VCT yang telah disebutkan sebelumnya.

- a. Model VCT klarifikasi nilai dengan kartu keyakinan (*evidence card*).

VCT model ini baik digunakan untuk melatih kemampuan siswa mengklarifikasi masalah dan pemecahan secara rasional untuk selanjutnya menentukan sikap/pendirian/penilaiannya (Achmad Kosasih Djahiri, 1985: 75). Contoh format kartu keyakinan adalah sebagai berikut:

NAMA SISWA/KELOMPOK:.....		KELAS:.....
POKOK MASALAH:		
KRITERIA/ PENILAIAN/PEMECAHAN:	DASAR	PERTIMBANGAN
1. Data/fakta yang dijadikan sumber ialah :		
1.		4.
2.		5.
3.		6.
2. Pertimbangan-Pertimbangan kami (analisa dan pemikiran kami ialah :		
3. Kesimpulan pemikiran/pendapat kami :		
4. Pemecahan dan alasannya: -		
5. Penjelasan lain:		

Sumber: Dimodifikasi dari Soenarjati dan Cholisin, 1994.

Dalam menggunakan model VCT klarifikasi nilai dengan menggunakan kartu keyakinan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, yaitu:

- 1) Dalam pengisian kartu hendaknya jangan dibaurkan masalah negatif dengan yang positif.

- 2) Dalam memproses (saat klarifikasi) seyogianya kartu-kartu itu dipertukarkan antar siswa, dan kemudian setiap item minta dibacakan isian kartu yang bersangkutan tanpa menyebut nama pengisinya.
- 3) Isian/jawaban yang baik atau mendekati target dicatat guru di papan tulis untuk digunakan sebagai bahan kesimpulan dan arahan kembali saat materi pelajaran.
- 4) Waktu yang diberikan untuk mengisi kartu kurang lebih selama 30 menit.
- 5) Untuk tindak lanjut pelajaran bisa saja sisa masalah dijadikan PR kelompok (usahakan dibentuk kelompok baru). (Achmad Kosasih Djahiri, 1985: 76).

Untuk dapat mengambil keputusan terhadap dilema nilai yang dihadapi ada 7 tahap yang harus dilewati agar sampai pada pemecahan masalah yang rasional obyektif. Tujuh tahap itu meliputi:

- 1) Menentukan peristiwa yang merupakan dilema (*dilemma*)
- 2) Menentukan alternatif-alternatif apa yang akan dikerjakan untuk memecahkan dilema (*alternatives*)
- 3) Menentukan akibat-akibat apa yang akan terjadi dari masing-masing alternatif yang akan dikerjakan (*consequenes*)
- 4) Jika akibat-akibat itu terjadi (tahap 3) bagaimana akibatnya dalam jangka panjang dan jangka pendek (*consequenes of consequenes*)
- 5) Fakta-fakta atau bukti-bukti apa yang menunjukkan bahwa akibat-akibat itu akan terjadi (*what evidence is there that consequences wil occur*)
- 6) Megadakan penilaian (*asasmen*) mengenai akibat mana yang baik dan akibat mana yang buruk, berdasarkan pada kriteria tertentu

7) Mengambil keputusan nilai mana yang akan dilaksanakan (*decision*) (Soenarjati dan Cholisin, 1994 : 126-127).

b. VCT melalui Teknik Wawancara/Interview (*Public Interview*).

VCT dengan teknik ini baik untuk digunakan dalam pembelajaran PKn karena dapat: a) melatih siswa berkomunikasi dan mengemukakan pikirannya, b) melatih keberanian siswa dalam menghadapi orang/pejabat, c) melatih siswa mengklarifikasi pandangan/penilaiannya secara baik, jelas, dan sistematis, dan d) membina kesinambungan dunia sekolah dengan kenyatannya serta memberikan informasi dari tangan pertama kepada para siswa (Achmad Kosasih Djahiri, 1985: 78).

Dalam pelaksanaan VCT melalui teknik wawancara/interview beberapa langkah kegiatan operasional dalam pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Penentuan masalah dan narasumber (oleh guru bersama guru lain dan kepala sekolah).
- 2) Penyusunan skenario masalah yang harus diungkap siswa (bila perlu dijabarkan masalah apa yang disiapkan dan ditanyakan oleh siapa).
- 3) Pembentukan kelompok siswa dan penentuan juru bicaranya serta pemberian petunjuk untuk mempersiapkan bahan wawancara oleh para siswa (kelak ditelaah dan diluruskan kembali oleh guru atau dibahas di kelas agar tidak duplikasi /tumpang tindih).
- 4) Tahap simulasi atau bermain peran untuk gladi kotor atau gladi bersih sebagai persiapan siswa dan guru.
- 5) Tahap pelaksanaan wawancara dengan nara sumber (bisa tamu atau pejabat). Kegiatan ini melalui tahap sebagai berikut:

a. Pembukaan oleh guru, berisi:

- Menerangkan maksud dan tujuan, serta cara pelaksanaan pembelajaran dan waktunya.
 - Ucapan terimakasih.
- b. Kesempatan tamu untuk memberikan pengarahannya/penjelasan singkat tentang pokok hal yang diminta.
 - c. Wawancara siswa dengan narasumber.
 - d. Penyimpulan wawancara oleh guru dan penyampaian terimakasih kepada narasumber.
- 6) Pembahasan hasil wawancara melalui kegiatan belajar mengajar, meliputi:
- a. Penyimpulan dari para siswa
 - b. Pandangan/tanggapan siswa
 - c. Penyimpulan dan pengarahannya guru.
- 7) Tindak lanjut (Achmad Kosasih Djahiri, 1985: 78).

4. Ceramah bervariasi

Metode ceramah merupakan cara penyajian dan penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa secara lisan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri dari metode ini diantaranya seorang guru berbicara terus menerus secara monoton, sedang siswa berperan sebagai pendengar, sehingga yang terjadi adalah interaksi searah yaitu hanya diwarnai dengan inisiatif guru kepada siswa bukan sebaliknya.

Metode ceramah merupakan metode yang paling tua, dan konvensional. Akan tetapi metode ini tetap bertahan hingga saat ini. Metode ceramah tetap dapat digunakan dan diperlukan dalam pembelajaran, hanya saja perlu diperbaiki dalam hal penyajiannya agar siswa tidak merasa bosan.

Jika digunakan secara optimal, metode ceramah memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

- a. Menghemat dalam penggunaan waktu dan alat.
- b. Dapat membangkitkan minat belajar siswa.
- c. Membantu siswa mengembangkan kemampuan mendengar.
- d. Merangsang kemampuan siswa mencari sumber informasi.
- e. Bisa untuk menyampaikan informasi pengetahuan yang baru.

Akan tetapi sebaliknya jika metode ceramah tidak digunakan secara optimal dalam pembelajaran, maka akan memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Berpusat pada guru.
- b. Siswa hanya berperan sebagai pencatat dan pendengar.
- c. Menuntut kecepatan dan logat bahasa guru yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Oleh karena itu metode pembelajaran ceramah bervariasi dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar apabila:

- a. peserta yang hadir dalam jumlah relatif besar
- b. materi pelajaran bersifat informatif, sehingga guru hanya berperan sebagai pemberi informasi saja
- c. guru pandai menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan informasi yang hendak disampaikan.
- d. Suasana cukup tenang
- e. Siswa cukup mampu untuk menangkap ungkapan-ungkapan lisan dari gurunya.

Metode ceramah jarang sekali diterapkan dalam pembelajaran tanpa dibarengi dengan metode yang lain. Biasanya penggunaan metode ceramah dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang lain misalnya tanya jawab, yang kemudian dikenal dengan sebutan ceramah bervariasi. Metode ceramah bervariasi muncul sebagai upaya untuk:

- a. Menutupi atau mengimbangi kelemahan-kelemahan metode ceramah murni.
- b. Memusatkan perhatian siswa kepada pokok masalah yang sedang dibahas dalam aktivitas belajar mengajar.
- c. Mengontrol daya tangkap siswa terhadap isi ceramah.
- d. Melibatkan potensi (indra) siswa secara optimal (tidak hanya pendengaran saja).

Penerapan metode ceramah dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar diantaranya untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bersifat informatif dan konsep. Beberapa materi yang bersifat informasi dan konsep di antaranya adalah pengertian hidup rukun, pengertian musyawarah, pengertian globalisasi, dan sebagainya.

5. Tanya jawab

Menurut Jusuf Djajadisastra, seperti dituliskan Soenarjati dan Cholisin, 1994:120) metode tanya jawab adalah suatu cara untuk menyampaikan atau menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh murid. Seperti halnya metode-metode pembelajaran yang lain, metode tanya jawab juga mengandung keunggulan dan kelemahan.

Metode pembelajaran tanya jawab dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar, karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

- a. Mendukung terlaksananya pembelajaran inkuiri.
- b. Meningkatkan keaktifan belajar siswa.
- c. Mengembangkan minat ingin tahu.
- d. Meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat.
- e. Memusatkan perhatian siswa.

Metode tanya jawab akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran jika:

- a. dikombinasikan dengan metode ceramah atau metode lainnya

- b. murid-murid terhimpun dalam kelas (jumlah) yang relatif kecil
- c. murid sudah dapat menguasai materi pelajaran yang telah diberikan dengan baik.

Contoh penerapan metode tanya jawab dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar misalnya untuk mengajarkan kompetensi dasar menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selama proses belajar mengajar berlangsung guru melakukan Tanya jawab dengan siswa seputar organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk lancarnya pelaksanaan metode ini, diharapkan siswa sudah mempunyai bekal membaca materi terkait dengan organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat terlebih dahulu. Apabila siswa belum memiliki bekal pengetahuan tentang materi pembelajaran, maka yang terjadi Tanya jawab antara guru dan siswa menjadi tidak lancar.

6. Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan menugaskan pelajar atau kelompok pelajar melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencari kebenaran dalam rangka mewujudkan tujuan pelajaran (Soenarjati dan Cholisin, 1994:121). Peran siswa dalam diskusi adalah berusaha dengan jujur untuk memperoleh suatu keputusan atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi kesepakatan bersama. Jalannya diskusi diatur oleh seorang pemimpin sidang (moderator). Hasil diskusi ditulis oleh seorang notulen.

Metode diskusi tepat digunakan dalam pembelajaran PKn karena dapat menggali beberapa kemampuan siswa di antaranya:

- a. guru hendak mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dan mengemukakan pendapat secara lisan.

- b. Materi pembelajaran bersifat problematis, bukan merupakan informas.

Dalam pelaksanaan diskusi hendaknya ada pedoman yang jelas dan disepakati oleh peserta diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Contoh penggunaan metode diskusi ini misalnya untuk mengajarkan kompetensi dasar menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya siswa satu kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok, dengan anggota setiap kelompok berjumlah 4-5 orang. Masing-masing kelompok diberikan tema diskusi terkait dengan materi pembelajaran tersebut. Kepada masing-masing kelompok diberikan waktu untuk mendiskusikan topik pembelajaran yang sudah dipilih guru. setelah selesai masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya, dengan dipandu oleh seorang moderator. Anggota kelompok lain diminta menjadi *audience* yang bertugas memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Demikian dilakukan secara bergantian.

7. Pemecahan masalah (*problem solving*)

Metode pemecahan masalah (*problem solving*) adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menganalisa masalah yang diajukan guru terkait dengan materi pelajaran. Melalui kegiatan analisa masalah ini diharapkan siswa dapat menemukan pengalaman baru untuk mengatasi masalah yang terjadi melalui sudut pandang mereka sendiri. Salah satu contoh pelaksanaan metode ini misalnya untuk mengajarkan kompetensi dasar memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Kepada siswa diberikan masalah tentang pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat. Kemudian siswa diminta mengelompokkan ke dalam pengaruh positif, maupun negatif. Untuk selanjutnya siswa diminta untuk memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

8. Bermain Peran (*role playing*)

Metode bermain peran yaitu suatu cara yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dimana siswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menjelaskan sikap dan nilai-nilai serta memainkan tingkah laku (peran) tertentu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan melalui metode bermain peran ini diharapkan nantinya siswa dapat: 1) untuk membina nilai-nilai moral tertentu 2) meningkatkan kesadaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai. 3) untuk membina penghayatan siswa terhadap suatu kejadian atau hal yang sebenarnya dalam realitas hidup.

Contoh pelaksanaan metode pembelajaran bermain peran ini, misalnya untuk mengajarkan kompetensi dasar menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa di dalam kelas diminta untuk memerankan beberapa peran tokoh yang berbeda-beda terkait dengan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Kemudian dibuat skenario permainannya, dan diminta siswa menampilkan peran sesuai yang dituntutkan kepadanya. Misalnya peran pelajar, peran penegak hukum, peran aparat keamanan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

9. Karya wisata

Karya wisata merupakan satu metode pembelajaran dimana siswa melakukan kunjungan ke suatu tempat. Pada objek kunjungan karya wisata ini siswa dan guru melakukan pembelajaran. Dengan metode karya wisata ini diharapkan siswa akan mendapat pengalaman langsung dari objek yang dituju.

Lokasi karya wisata yang dapat dijadikan objek pembelajaran PKn misalnya panti asuhan. Tempat ini berfungsi untuk menanamkan nilai moral empati kepada peserta didik. Di samping itu dapat juga berkunjung ke museum

untuk melihat benda-benda bersejarah. Dapat juga siswa melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintahan pusat yang ada di Jakarta, dan sebagainya.